

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Fenomena yang menggambarkan hal ini yaitu tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan tingginya tingkat kemiskinan, hutang luar negeri, kurs rupiah yang tidak stabil sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif bagi sektor-sektor perbankan dan rill secara umum.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka harus dicari solusi yang terbaik untuk keluar dari permasalahan ekonomi agar roda perekonomian dapat berputar. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan solusi yang terbaik karena Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengatasi masalah pengangguran. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peluang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka mengingat Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. Selain itu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan di saat krisis disebabkan modal usahanya dari modal sendiri.

Menyadari peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap perekonomian Indonesia serta permasalahan yang dihadapinya, maka pemerintah memberikan perhatian pada sektor ini, diantaranya dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK/016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, serta mengembangkan potensi usaha kecil dan koperasi sehingga menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi. Selanjutnya dalam UU No.25 tahun 2000 sendiri mengenai Program Pembangunan Nasional (Propernas) sektor usaha kecil dan menengah, usaha mikro dan koperasi menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengeluarkan sejumlah keputusan maupun peraturan dan undang-undang, akan tetapi hal ini dirasakan belum mampu memenuhi harapan pengusaha kecil dan koperasi. Hal ini dikarenakan masih dijumpai keterbatasan akses usaha kecil menengah dan koperasi dalam memperoleh sumber modal untuk mengembangkan usahanya yang disebabkan terbatasnya jaminan-jaminan debitur untuk meminjam dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, disamping kurangnya informasi dan komunikasi antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi dengan bank / lembaga keuangan, serta masih rancunya pengertian, ketentuan dan penanganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh pemerintah.

Menyadari hal diatas maka pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan Bina Lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN.

Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi bersekala kecil.

Program - program PKBL terdiri dari Kemitraan dan Bina Lingkungan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil dan menengah serta koperasi disekitar lokasi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Program bina

lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN. Besarnya dana Program kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang bersumber dari laba bersih paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program kemitraan oleh salah satu BUMN dalam hal ini PT TASPEN (Persero), sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Piutang Program Kemitraan dan Kolektibilitas Terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Berapa besar pengaruh piutang Program Kemitraan terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero)?
- b. Berapa besar pengaruh kolektibilitas piutang Program Kemitraan terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh piutang Program Kemitraan terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero)
- b. Untuk menganalisis pengaruh kolektibilitas piutang piutang Program Kemitraan terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan berkaitan dengan pemberian kredit dan sebagai *feedback* bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang selama ini diterima selama kuliah, serta untuk mengetahui praktek kerja sesungguhnya.